

BAB III

SIKAP NEGARA IRAN TERHADAP KONFLIK SURIAH

Konflik yang terjadi di Negara Suriah pada masa pemerintahan Bashar Al Assad menimbulkan berbagai reaksi, baik mendukung maupun menolak. Negara-negara seperti Iran, Rusia dan China mendukung pemerintahan Bashar al Assad untuk tetap berdiri, sedangkan pihak oposisi yang didukung oleh Amerika Serikat, PBB dan beberapa Negara Eropa menginginkan Bashar untuk turun dan digantikan. Alasan Iran mendukung Bashar dapat dijelaskan dengan melihat sejarah hubungan kedua Negara. Kemudian pembahasan bab ini akan membahas pro dan kontra oleh Negara-negara lain atau lembaga internasional termasuk sanksi dari PBB terhadap Suriah, kemudian sikap yang diambil oleh Iran dan Negara yang mendukung atau Negara-negara yang menentang pemerintahan Bashar al Assad

A. Konflik Dalam Negeri Suriah Pada Masa Pemerintahan Bashar Al Assad.

1. Proses terjadinya konflik di Suriah.

Ekskalasi konflik yang terjadi di kawasan Arab, Afrika dan Timur Tengah akhir-akhir ini semakin meningkat, ditunjukkan dengan memanasnya situasi dalam negeri Negara-negara seperti Suriah, Mesir, Tunisia, Yordania dll. Gonjang ganjing politik di kawasan ini, sudah mengarah kepada kekacauan politik terlebih lagi bagi pemerintah yang otoriter, yang tidak mau mendengar suara rakyatnya yang sedang dalam kondisi tertekan dan menginginkan perubahan. Konflik tersebut seperti sebuah permainan kartu domino yang dapat menjalar ke rezim-rezim negara Arab, Afrika, dan Timur Tengah yang bermasalah, kemudian menciptakan ketidak-stabilan politik, ekonomi, bahkan berujung

pada tragedi peperangan dan revolusi. Konflik ini berawal dari pergolakan rakyat di Tunisia, lalu menyebar ke Mesir, Aljazair, Yaman, Bahrain, Libya dan negara-negara lain di Timur Tengah. Dalam revolusi, dua pemimpin yang meninggalkan jabatannya dan melarikan diri, yaitu mantan Presiden Tunisia Zine Abidin Ben Ali dan mantan Presiden Hosni Mubarak.²⁸

Konflik yang terjadi di Suriah dilatarbelakangi oleh keberhasilan perjuangan rakyat di Negara Mesir, Tunisia dan Libya yang berhasil menjatuhkan rezim otoriter mereka. Gejolak politik di negara Suriah disebabkan oleh faktor “api dalam sekam” sebagai akibat sistem perpolitikan dan ekonomi rezim negara yang tidak lagi mampu secara memadai mengakomodir dan menyesuaikan diri dengan perubahan struktur sosial dan perkembangan tingkat harapan masyarakat yang berubah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa rezim militer Suriah dimulai sejak masa Presiden Jenderal Hafez Al-Assad yang berkuasa selama tiga dekade, menjalankan sistem politik dan kekuasaan yang otoriter dan tertutup. Kebebasan berpendapat rakyat disana sangat dibatasi oleh rezim Partai Sosial Arab Baat yang berkuasa sejak puluhan tahun silam ini dalam menanamkan kekuasaan politik Oligarki. Sistem politik ini kemudian mengalami pembusukan yang disebabkan oleh perubahan jaman yang tidak mampu diantisipasi. Sistem yang tidak sehat tersebut itulah yang kemudian diwariskan kepada sang anak melalui sistem Pemilu yang juga tidak transparan dan demokratis, lebih terkesan seperti penunjukan langsung. Sang anak, “sang dokter manis” yang bernama Bashar Al-Assad memulai jabatannya sebagai presiden Suriah pada tahun 2000 hingga sekarang.

²⁸ Apriadi Tamburuka. *Revolusi Timur Tengah, Kejatuhan Para penguasa Otoriter di Negara-negara Timur Tengah* (Jakarta: PT. Buku Seru, 2011) hlm, 9.

Bashar al-Assad dilahirkan di Damaskus pada tanggal 11 September 1965. Dia merupakan putra kedua Hafez al-Assad yang merupakan presiden Suriah pada 1970 hingga 2000. Sebelum meninggal, Hafez sebenarnya telah mempersiapkan anak lelakinya yang lain, Basil al-Assad, sebagai penggantinya untuk duduk di kursi kepresidenan Suriah. Namun, karena Basil tewas dalam kecelakaan mobil pada tahun 1994, Hafez yang saat itu sedang berada di London untuk mempelajari oftalmologi dan memimpin Syrian Computer Society akhirnya dipanggil kembali ke Suriah. Setelah kembali ke Suriah, Bashar kemudian dilatih secara bertahap agar siap menggantikan ayahnya sebagai presiden. Persiapan tersebut dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama, dibangunlah sebuah kekuatan dukungan untuk Bashar di bidang militer dan perlindungan. Kedua, citra Bashar diperbarui dan diperkuat di matarakyat. Terakhir, Bashar diperkenalkan lebih mendalam dengan mekanisme untuk mengatur negara. Untuk meningkatkan kredibilitasnya dalam bidang militer, pria yang dikenal dengan panggilan dr. Bashar ini masuk akademi militer di Homs yang terletak di sebelah utara Damaskus pada tahun 1994. Dia menjadi perwira pada bulan Januari 1999. Seiring dengan makin berkembangnya karir Bashar dalam militer, dia juga mendapatkan lebih banyak kekuasaan dan menjadi penasihat politik Presiden Hafez, kepala biro untuk menerima keluhan dari warga, dan melakukan kampanye anti korupsi. Karena kampanye ini, Bashar sukses menyingkirkan lawan potensialnya sebagai presiden.

Bashar Al Assad kemudian dilantik sebagai presiden pada tahun 2000, dia memberikan janji untuk menjadikan Suriah menjadi lebih modern dan demokratis. Dalam pidato pelantikannya, Bashar pun menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan menjadi pemimpin yang berbeda dari ayahnya. Dalam situs resminya, Bashar menyatakan dia

telah membangun zona perdagangan bebas, mengizinkan lebih banyak pihak swasta dan universitas swasta, serta berjuang mengatasi korupsi dan pemborosan yang dilakukan pemerintah. Namun, banyak orang mengatakan bahwa sebagian besar janji Bashar belum terwujud hingga kini meskipun sudah ada sejumlah perubahan dalam pemerintahannya. Bashar sempat menyatakan bahwa reformasi yang dijalkannya tersendat karena adanya kerusuhan di negara-negara tetangga yaitu Lebanon dan Irak.

Beberapa tokoh Suriah menganggap Bashar sebagai sosok yang canggung dan tidak memiliki kepribadian untuk memimpin. Bahkan sang paman, Rifaat, yang meninggalkan Suriah pada tahun 1984 setelah terlibat dalam kudeta yang gagal, mengatakan bahwa Bashar amat berbeda dengan sang ayah yang merupakan seorang pemimpin. Masa pemerintahan Bashar yang masih berjalan hingga saat ini berjuang menyelesaikan masalah politik internasional yang belum terpecahkan. Misalnya, permasalahan air dengan Turki, hubungan yang rumit dengan Libanon, perebutan Dataran Tinggi Golan dengan Israel, dan permusuhan dengan raja Jordan.

Meskipun menjanjikan lebih banyak media dalam pemerintahannya, namun kebebasan media masih dibatasi oleh negara. Sebuah undang-undang yang dikeluarkan pada tahun 2007 mewajibkan warnet untuk merekam semua komentar yang diposkan pengguna pada forum obrolan. Situs web seperti Wikipedia Arab, YouTube, dan Facebook diblokir antara tahun 2008 hingga Februari 2011²⁹. Kelompok Hak Asasi Manusia, misalnya Human Rights Watch dan Amnesty International, mengungkapkan

²⁹Suriah Cabut larangan Facebook dan Youtube, 10 feb 2011, <http://techno.okezone.com/read/2011/02/10/55/423301/large>, diakses pada 9 april 2013)

bahwa rezim Bashar dan polisi rahasianya secara rutin menyiksa, memenjarakan, dan membunuh musuh politik dan mereka yang membangkang dari rezimnya. Dalam sebuah wawancara dengan ABC News pada tahun 2007, Bashar menyebutkan bahwa tidak ada tahanan politik di Suriah, namun, New York Times melaporkan 30 tahanan politik ditangkap di Suriah pada bulan Desember 2007.

Konflik dimulai pada tahun 2011 di kota Deraa, Suriah. Warga turun ke jalan untuk memprotes setelah adanya penangkapan terhadap 15 murid sekolah yang menuliskan grafiti anti-pemerintah pada dinding yang kemudian mereka disiksa oleh pemerintah. Protes ini ditanggapi dengan kemarahan oleh pihak pemerintah, pada tanggal 18 Maret 2011 para tentara yang mengawasi jalannya protes justru menembaki para demonstran dan menewaskan 4 orang. Keesokan harinya kemarahan mereka berlanjut dengan penembakan di pemakaman pada para pelayat saat pemakaman para korban. Berita ini tersebar dan membuat rakyat Suriah geram terhadap perlakuan pemerintah tersebut, akhirnya kerusuhan pun tidak terelakan dan menyebar keseluruh bagian Negara Suriah. Tuntutan rakyat Suriah tidak lagi terbatas hanya terbatas pada pertanggung jawaban pemerintah terhadap kematian warganya tetapi semakin berkembang kearah kebebasan atas penindasan yang selama ini mereka rasakan. Tuntutan untuk pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan menjadi isu utama perjuangan para demonstran. Rakyat Suriah (terutama para kaum generasi muda), semakin pintar, kritis dan semakin berwawasan termasuk terhadap akses informasi yang mencerahkan berbagai hal (bahkan banyak diantaranya yang lulusan luar negeri dengan membawa semangat perubahan baru). Ditambah lagi oleh faktor semakin mengglobalnya dunia oleh perkembangan Teknologi Informasi yang menyebabkan masyarakat suatu bangsa

dimanapun dewasa ini menjadi cenderung "open minded" dan menjadi heterogenitas dalam pemikiran dan aspirasi. Sudah menjadi gejala umum bahwa dimana-mana telah terjadi perubahan sosial yang signifikan sebagai akibat proses alamiah perkembangan sosial masyarakat itu sendiri, dari model "tradisionil" menuju ke masyarakat "modern" dengan berbagai atribut yang mengikutinya. Akan tetapi, pemahaman rezim militer yang berkuasa sering kali tertinggal satu atau dua langkah dalam mengantisipasi hal-hal seperti ini. Doktrin-doktrin kuno pembinaan teritorial militer yang hanya berfokus menjaga kestabilan, cenderung diterapkan dengan pendekatan represif dan frontal terutama dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan "kerumunan massa" dan kemajemukan. Militer sering menutup diri terhadap kritik dan sering pula kemudian menjadi canggung untuk bersikap terbuka jika dihadapkan pada pilihan antara mengamankan kekuasaan dan menciptakan stabilitas negara. Maka tidaklah heran jika kemudian yang terjadi adalah, tragedi demi tragedi yang dipertontonkan sejarah secara tranparan ke dunia. Ketidakmauan dan ketidaktahuan untuk mengakui bahwa jaman selalu bergerak berubah dan terjadi perubahan sosial signifikan di semua lini masyarakat "modern" tersebut, akhirnya (cepat atau lambat) menciptakan semacam "hymne kematian" semua bentuk hegemoni kekuasaan sistem politik otoriter yang didukung militer dimana-mana, termasuk di kawasan Arab.

Demonstrasi semakin besar dan meluas ke berbagai daerah, pemerintah Suriah menanggapi hal ini tetap dengan cara kekerasan dan menggunakan kekuatan militer atau represif untuk menghentikan mereka, sehingga perlawanan rakyat pun berubah menjadi perlawanan menuntut revolusi karena pemerintah dianggap sudah tidak mau lagi mendengar pendapat rakyatnya dan membantai rakyatnya sendiri. Akhirnya revolusi

Suriah pun terjadi, peperangan antara pihak revolusioner atau oposisi dan pemerintah bertarung menggunakan senjata dan saling membunuh. Pemerintah Suriah kemudian menyatakan mereka adalah kaum pemberontak yang ingin menghancurkan Negara Suriah dan di dukung oleh pihak-pihak asing didalamnya. Korban yang berjatuh sudah sangat banyak dan diputuskan bahwa terjadi tragedi kemanusiaan di Suriah oleh lembaga Internasional. Tidak hanya korban jiwa tetapi para pengungsi akibat perang ini terus bertambah setiap harinya, para pengungsi ini meninggalkan tempat mereka dan menuju Negara-negara tetangga yang berbatasan dengan Suriah. Tentu saja hal ini mengakibatkan masalah baru yang sudah bisa diperkirakan sebelumnya akan terjadi apabila perang bekecambuk di Suriah, tetapi pada kenyataannya keadaan para pengungsi ini benar-benar seperti nama mereka yang terbuang dan tidak mendapat perhatian akan kelangsungan hidup mereka.

2. Respon Dunia Internasional Terhadap konflik di Suriah.

Konflik yang terjadi di Suriah tidak dapat kita samakan dengan yang terjadi di Lybia, Tunisia atau Mesir. Hal ini di karenakan konflik Suriah memberikan dampak tidak hanya pada dalam negerinya tetapi juga mempengaruhi kepentingan regional seperti hubungan Liga Arab dan Iran, bahkan juga mempengaruhi kepentingan global. Terutama dengan adanya pernyataan dari Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, yang akan menyerang Suriah³⁰. Bahkan dikhawatirkan konflik ini akan mengakibatkan Perang Dunia ke tiga apabila dilihat dari banyaknya kepentingan yang bermain di dalamnya.

³⁰AS Siap Serang Suriah, Obama Ajak Inggris dan Prancis, 31 agustus 2013 pada <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/13/08/31/msdb0f-as-siap-serang-suriah-obama-ajak-inggris-dan-prancis>, diakses pada 20 september 2013.

Apabila dilihat dari negara yang terlibat atau memiliki kepentingan dalam konflik Suriah, dapatlah dibedakan menjadi beberapa respon setiap aktornya.

- Liga Arab

Liga Arab adalah organisasi yang dibentuk untuk membantu kemerdekaan Negara-Negara Arab yang saat itu belum merdeka dari penjajahan. Setelah semua Negara Arab merdeka, tujuan Liga Arab berlanjut untuk mempersatukan Negara - negara Arab dalam segala hal. Diawali dengan perbedaan pendapat yang tercipta dari Negara -negara Arab yang terbagi dalam dua kubu, Pan-Islamisme dan Pan-Arabisme. Dua pendapat yang bertentangan antara satu dengan yang lain, yang mana menciptakan ketegangan antara kedua kubu. Setiap kubu saling mempertahankan ideologinya, yang mana kubu Pan-Arabisme yang menginginkan Negara -negara Arab bersatu, sedangkan Pan-Islamisme memandang bahwa kemerdekaan Negara- negara Arab sudah cukup dan persatuan dalam satu kawasan adalah hal yang baik. Hal inilah yang mulai memicu permasalahan internal dalam Liga Arab yang berpacu pada pandangan Pan-Islamisme, sedangkan ada beberapa negara Arab yang masih berkiblat pada pandangan Pan-Arabisme seperti Libya, Suriah, Irak, dan Mesir. Namun karena Libya, Irak dan Mesir bisa dikatakan telah bertekuk lutut setelah para pengusung Pan-Arabisme tumbang, maka tinggalah Suriah yang menjadi satu-satunya negara Arab yang masih kental dengan Pan-Arabisme. Pertentangan pendapat antara Liga Arab dan Suriah terus berlangsung sampai saat ini, hingga muncul kasus yang menimpa Suriah yang tentunya menjadi tanggung jawab bagi Liga Arab untuk membantu penyelesaian konflik yang terjadi pada Negara - negara Arab, terutama dalam hal ini Suriah telah menandatangani Pakta Liga Arab dan juga sebagai salah satu negara pendiri Liga Arab khususnya. Sebagai tugas utama

organisasi regional di kawasan Timur Tengah, sangatlah wajar jika Liga Arab mengirimkan utusannya untuk mengawasi keadaan di Suriah yang dapat menjadi acuan bagi para anggota Liga Arab untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat diberikan sebagai bantuan untuk Suriah. Namun keadaan ini menjadi cukup rumit karena konflik yang sudah terlebih dahulu terjadi antara Liga Arab dan Suriah yang membuat hubungan keduanya renggang.

Ketika konflik di Suriah semakin memanas, Liga Arab memutuskan untuk memberikan sanksi terhadap Suriah setelah perwakilan pengamat mereka ditolak masuk untuk mengamati konflik di Suriah. Sanksi diputuskan setelah terjadi pertemuan antar anggota dan melakukan voting dengan hasil 19 mendukung dari 22 peserta yang hadir. Sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi ekonomi, meliputi pemutusan transaksi dengan Bank Sentral Suriah dan menghentikan semua bantuan dana dari pemerintah negara-negara Arab untuk berbagai proyek di Suriah.³¹

- Uni Eropa

Uni Eropa adalah mitra dagang pertama untuk Suriah dengan total perdagangan sekitar € 6,1 juta pada tahun 2011, dimana sekitar 90% dari ekspor Suriah ke Uni Eropa terdiri dari barang energi, dilengkapi dengan produk-produk pertanian dan tekstil. Pada tahun 2012 ekspor Uni Eropa ke Suriah terdiri dari mesin dan peralatan transportasi (29,2%), produk pertanian (27,8%) dan bahan kimia (22,3%). Impor Uni Eropa dari

³¹Liga Arab Akhirnya Jatuhkan Sanksi kepada Suriah, 27 nov 2011 pada <http://internasional.kompas.com/read/2011/11/27/22545940/Liga.Arab.Akhirnya.Jatuhkan.Sanksi.kepada.Suriah>, diakses pada 22 september 2012.

Suriah pada tahun 2012 terdiri dari produk-produk energi (33,8%), produk pertanian (23,1%) dan tekstil dan pakaian (22,6%)³².

Jika dilihat persentase ketergantungan Uni Eropa sangatlah besar di bidang energi yang memang merupakan kekuatan ekspor ekonomi utama Suriah, tetapi ketika represi kekerasan internal di Suriah, Mei 2011 Uni Eropa mengadopsi sejumlah tindakan pembatasan atau sanksi terhadap Suriah, termasuk larangan impor minyak mentah dan produk minyak bumi serta pembatasan ekspor termasuk pada barang bekas, peralatan dan teknologi untuk industri minyak dan gas, serta peralatan telekomunikasi dan barang-barang mewah tertentu. Tindakan pembatasan atau sanksi yang diterapkan oleh Uni Eropa juga menyangkut sektor keuangan dan transportasi serta pembiayaan usaha tertentu dan proyek-proyek infrastruktur di Suriah. Selain itu, dana dan sumber daya ekonomi dari pendukung atau orang yang membantu rezim Bashar juga telah dibekukan.

- Russia dan China

Russia dan China saat ini sedang membangun kekuatan ekonomi mereka ke daerah Timur Tengah dan Arab, salah satunya adalah Suriah. Kerjasama yang dilakukan terutama dalam bidang militer, ekonomi dan politik. Investasi Russia di Suriah pada tahun 2009 mencapai USD 19,4 miliar, terjadi pada jual beli persenjataan, pembangunan infrastruktur negara dan pariwisata. Selain itu Russia juga tengah membangun kerjasama global negara setelah lepasnya Negara-negara eks-Uni Soviet.³³

³²Syiria pada http://www.eeas.europa.eu/syria/index_en.htm, diakses pada 22 september 2012.

³³Alasan Mengapa Russia Membela Suriah, 20 september 2011 pada <http://international.okezone.com/read/2011/09/20/412/504686/large>, diakses pada 23 september 2012.

Demikian pula halnya dengan China yang memiliki hubungan perdagangan yang sangat penting dengan Suriah. Suriah adalah salah satu Negara tujuan ekspor terbesar bagi China dan sebaliknya China adalah Importir minyak bumi dan gas yang besar bagi Suriah. Nilai ekspor China ke Suriah mencapai USD 2,2 miliar, banyak perusahaan-perusahaan minyak dan tambang China yang berinvestasi di Suriah.³⁴

Bisa kita lihat bahwasannya kerjasama antara Russia-China-Suriah sebagian besar dalam bidang perminyakan dan gas, hal ini lah yang menjadi alasan mengapa Russia dan China mendukung pemerintahan Bashar di Suriah. Mereka khawatir apabila kepemimpinan Bashar diganti dengan orang lain maka tidak menutup kemungkinan kerugian juga akan diterima oleh Russia dan China, belum lagi apabila pengganti Bashar adalah orang yang pro terhadap Amerika.

- Amerika Serikat

Tidak bisa dipungkiri keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik di Suriah sangatlah jelas terlihat, di mulai dari pernyataan sikap mendukung pihak oposisi di Suriah³⁵ oleh pemerintah Amerika Serikat hingga pernyataan Presiden Obama bahwa Amerika Serikat akan menyerang Suriah menjadi bukti kuat bahwasannya Amerika Serikat memiliki kepentingan yang sangat kuat terhadap Suriah.³⁶ Terutama kepentingan

³⁴China-Rusia Kerjasama Militer dan Ekonomi Global, 6 juni 2012 pada <http://www.investor.co.id/home/china-rusia-kerjasama-militer-dan-ekonomi-global/37741>, diakses pada 23 september 2012.

³⁵Obama: Kami Sepakat untuk Mendukung Para Pemberontak Suriah 22 juli 2013, pada <http://www.shabestan.net/id/pages/?cid=10891>, diakses pada 5 September 2013.

³⁶Pernyataan Presiden AS Mengenai Suriah, 1 September 2013 pada http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/news/wh_130901id.html, diakses pada 5 September 2013.

menggulingkan pemerintahan Bashar yang akan diganti dengan sosok pro-Amerika agar memudahkan jalan mereka masuk ke Timur Tengah terutama ke Iran.

Keinginan Amerika atau Obama untuk menyerang Suriah menggunakan kekuatan militer tidak sepenuhnya mendapat dukungan, justru penolakan keras datang dari dalam negeri Amerika Serikat. Rakyat Amerika merasa kecewa dengan Obama yang dilihat sudah keluar dari jalur dan mengingkari janji terhadap warga Amerika untuk mengurangi peperangan dan akanberkonsentrasi pada masalah perekonomian dalam negeri ketika Obama berkampanye dalam pemilihan presiden.³⁷

3. Resolusi DKK PBB terhadap konflik di Suriah.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah menyepakati sebuah resolusi untuk mengamankan dan menghancurkan persediaan senjata kimia Suriah. Pemungutan suara dilakukan pada tanggal 27 September 2013 oleh Dewan keamanan yang beranggotakan 15 negara. Resolusi ini merupakan yang pertama disepakati terkait konflik Suriah sejak dimulai pada Maret 2011.³⁸

Sedangkan dua resolusi yang diajukan sebelumnya gagal disepakati karena veto oleh dua anggota tetap Dewan Keamanan, Rusia dan China. Resolusi itu diajukan pihak Barat untuk menekan rezim Presiden Bashar Al-Assad guna mengakhiri kekerasan. Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) di Den Haag yang mengawasi

³⁷Obama: "I understand" American people aren't with me on Syria strike, 11 September 2013 pada <http://www.cbsnews.com/news/obama-i-understand-american-people-arent-with-me-on-syria-strike/>, diakses pada 20 September 2013

³⁸DK PBB sahkan resolusi perlucutan senjata kimia Suriah, 28 September 2013 pada <http://www.antaraneews.com/berita/397853/dk-pbb-sahkan-resolusi-perlucutan-senjata-kimia-suriah>, diakses pada 1 November 2013.

senjata kimia dunia, telah menyetujui rencana pelucutan senjata untuk Suriah dan membuka jalan bagi pemungutan suara di PBB untuk menghasilkan resolusi tersebut. Untuk pertama kalinya, dewan mendukung usulan untuk transisi politik di Suriah yang diadopsi oleh Negara -negara kunci pada bulan Juni 2012 dan menyerukan konferensi internasional yang akan diselenggarakan “sesegera mungkin” untuk dilaksanakan. Resolusi itu menyerukan konsekuensi jika Suriah gagal mematuhi, tetapi hal itu masih akan bergantung pada dewan untuk menyepakati resolusi lain berkaitan dengan ketidakpatuhan Suriah. Pihak Suriah sendiri sebelumnya telah berjanji akan menyerahkan cadangan senjata kimia yang dimiliki. Hal itu terjadi menyusul laporan tim penyelidik PBB yang menyebutkan bukti yang kuat digunakannya senjata kimia di negeri itu dan telah menewaskan ratusan orang. Namun demikian, pihak internal Suriah masih saling menuding tentang siapa yang menggunakan senjata kimia. Resim Al-Assad menuding pihak oposisi, sementara pihak oposisi menuding militer pemerintah. Digunakannya senjata kimia di sana telah mengundang kecaman keras dunia internasional dan hal itu menjadi tekanan kuat bagi Suriah untuk menyelesaikan masalah ini.

B. Tahapan Hubungan Aliansi Iran – Suriah

Aliansi adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan secara umum mengenai hubungan antar negara yang terjadi di wilayah Arab dan Timur Tengah. Pola hubungan yang terjalin antar negara pastilah berdasar atas kepentingan negaranya, kepentingan ini kemudian menjadi alasan mengapa Negara -negara membentuk aliansi. Sejarah membuktikan betapa penting aliansi dalam hubungan internasional, seperti dibuktikan pada Perang Dunia 1, Perang Dingin bahkan perang Iran-Irak dan Perang Teluk. Hubungan yang terjadi antara Iran dan Suriah dapat dikategorikan sebagai aliansi,

persekutuan akan kepentingan bersama mengikat kedua Negara ini kedalam hubungan yang harmonis. Namun demikian, tidak ada yang menyangkal fakta dimana hingga kini Suriah dan Iran tidak pernah menandatangani perjanjian kerjasama militer secara resmi dan kerjasama keamanan mereka tidak didasarkan pada pakta militer yang formal, tetapi pada pakta informal pengaturan keamanan.

Seperti Charles W. Kegley dan Eugene R. Wittkopf mengatakan,

*"alliances usually form when two or more states face a common security threat. They are formal agreements among states to coordinate their behaviour."*³⁹

"Aliansi biasanya terbentuk ketika dua negara atau lebih menghadapi ancaman keamanan yang sama. Hal ini merupakan perjanjian formal antar negara untuk mengkoordinasikan perilaku mereka."

Aliansi terbentuk selain karena adanya kepentingan dalam negeri yang sama tetapi juga dapat diakibatkan mereka memiliki musuh yang sama. Pemerintah Suriah bermusuhan dengan Israel dan Amerika, kemudian Iran pasca revolusi 1979 memiliki pandangan yang berbeda dalam menanggapi keberadaan Amerika di Iran, dimana sebelumnya Iran sangat dekat dengan Amerika lalu berubah menentang keberadaan Amerika dengan segala intervensinya di Iran sehingga hal ini membuat hubungan antara Iran dan Amerika menjadi renggang bahkan semakin besar dan bermusuhan. Permusuhan Iran dengan Amerika menjadi salah satu alasan mengapa Suriah berusaha membangun hubungan dengan Iran walaupun Suriah mengetahui bahwasannya Iran menolak segala bentuk pemerintahan yang bersifat otoriter pada waktu itu, termasuk Suriah. Pasca revolusi Iran, hubungan aliansi Iran – Suriah memasuki era baru, dimana

³⁹Charles W. Kegley Jr. and Eugene R. Wittkopf, *World Politics: Trend and Transformation* (New York: Bedford/St. Martin's, 2004) hlm: 534.

hubungan mereka menjadi sangat harmonis, saling mendukung dan melindungi. Hubungan Teheran – Damaskus menjadi sangat penting bagi perpolitikan di kawasan Timur Tengah, terlebih lagi dengan melemahnya kekuatan Negara seperti Iraq dan Mesir sekarang, yang menjadikan kedua Negara ini sebagai poros kekuatan besar, ditambah dengan dukungan dari Russia dan China sebagai rekan mereka. Untuk lebih jelas mengenai hubungan aliansi Iran – Suriah yang telah mengalami beberapa tahapan paska Revolusi Islam Iran serta perubahan dalam struktur kekuasaan diakibatkan peristiwa regional dan internasional, setidaknya terdapat tujuh periode berbeda yang dapat menjelaskan:

1. Munculnya aliansi Iran – Suriah (1979-1982).
2. Zenith (titik tertinggi) hubungan Iran dan Suriah (1982-1985).
3. Ketegangan dan konsolidasi aliansi Iran – Suriah (1985-1988).
4. Kendali Irak di wilayah Levant dan Teluk (1988-1991).
5. Paska Perang Dingin (1991-2003).
6. Paska runtuhnya pemerintahan Saddam Husein di Irak (2003-2011).
7. Konflik Suriah dan keterlibatan Iran (2011 –sekarang).

Secara umum periode pertama hingga ketiga yang terpenting karena merupakan tahun-tahun awal dalam pembentukan aliansi dan mengarah kepada konsolidasi hubungan. Sedangkan tahapan berikutnya adalah akibat dari situasi kawasan yang mempengaruhi hubungan aliansi ini.

1. Munculnya aliansi Iran – Suriah (1979-1982).

Ketika Revolusi Islam Iran membuat pro-Barat, konservatif, rezim Shah Iran digulingkan pada bulan Februari 1979, Presiden Suriah saat itu Hafez Assad menganggap perubahan dalam pemerintahan di Teheran merupakan perkembangan yang positif, dan dirasa perlu untuk membangun hubungan baik dengan rezim revolusioner baru yang tampaknya bersimpati kepada tujuan Arab dan penderitaan Palestina. Bahkan, Suriah adalah negara Arab pertama yang mengakui pemerintahan sementara Perdana Menteri Mehdi Bazargan⁴⁰. Hubungan yang mulai terjalin antara Iran – Suriah pada tahun 1979-1980 bukan hanya dikarenakan peristiwa dalam negeri Iran saja tetapi juga bertepatan dengan memburuknya hubungan kedua negara dengan Irak. Setelah Mesir menandatangani perjanjian Camp David dengan Israel pada musim semi 1979, Suriah dan Irak mengadakan pembicaraan yang bertujuan untuk menciptakan persatuan politik antara dua negara, tetapi usaha mereka sia-sia karena perbedaan antara kedua belah pihak dan selisih pendapat, hingga akhirnya mengakibatkan saling tuduh. Secara bersamaan, hubungan antara Baghdad dan Teheran semakin memburuk, Presiden Irak Saddam Hussein takut bahwa gelombang Revolusi Islam Iran akan meluas, berpengaruh dan akhirnya mengguncang rezimnya. Saddam juga menafsirkan gejolak dalam negeri di Iran sebagai tanda kelemahan tetangganya, yang kemudian dengan rasa percaya diri terhadap situasi yang terjadi, Saddam melihat kesempatan emas untuk mengobarkan perang singkat untuk merebut wilayah di Iran, menggulingkan rezim Islam, dan menjadi kekuatan regional yang besar.

⁴⁰ Anoushiravan Ehteshami dan Raymond Hinnebusch, *Syria and Iran: Middle Powers in a Penetrated Regional System*. Routledge, New York, 1997. Hal 90.

Invasi Irak ke Iran pada bulan September 1980⁴¹ merupakan katalisator utama dalam pemulihan hubungan aliansi Iran – Suriah. Damaskus mengutuk Baghdad karena telah memulai konflik, dengan membuat pernyataan “Perang yang salah, melawan musuh yang salah, pada waktu yang salah.”⁴² Setelah Saddam Hussein terlihat tidak akan menghentikan agresinya, Damaskus mulai mengambil langkah dengan memberikan dukungan secara diplomatik dan militer mendukung Teheran guna menghentikan invasi Irak dan juga untuk mengubah gelombang peperangan.

Di bidang diplomatik, Suriah menggagalkan munculnya Front Persatuan Arab terhadap Iran pada pertemuan di Amman pada November 1980 yang di selenggarakan oleh sekutu setia Saddam Hussein, Raja Hussein dari Yordania. Suriah memobilisasi 30.000 tentara di sepanjang perbatasan dengan Yordania dan membujuk lebih dari setengah anggota Liga Arab untuk memboikot pertemuan itu.

Di bidang militer, Suriah membantu dengan pengiriman senjata ke Iran⁴³, dan bentuk bantuan militer lainnya, termasuk memfasilitasi serangan udara Iran terhadap lapangan udara militer Irak di H – 3 (Al – Walid , di Irak 50 km sebelah timur perbatasan Yordania – Irak) pada bulan April 1981, yang mengakibatkan kehancuran sebanyak 15-20 % dari angkatan udara Irak.

⁴¹ Beverly Milton-Edwards and Peter Hinchliffe, *Conflicts in the Middle East Since 1945*. New York, Routledge, 2001. Hal 88.

⁴²Patrick Seale, *Asad: The Struggle for the Middle East*. University of California Press, Berkeley, 1989, hlm 357

⁴³ Ehteshami dan Hinnebusch, *op.cit.*, 95.

Aliansi Iran – Suriah akhirnya disahkan pada bulan Maret 1982 ketika delegasi tingkat tinggi Suriah, dipimpin oleh menteri luar negeri Abdul al – Halim Khaddam mengunjungi Teheran dan membuat serangkaian perjanjian bilateral terutama tentang minyak, perdagangan dan militer. Suriah juga kemudian menutup aliran minyak Irak melalui IPC (trans – Suriah) pipa ke Mediterania, sehingga mengurangi ekspor minyak Irak lebih dari setengah juta barel / hari, yang berarti Irak mengalami kerugian sekitar \$17 juta per hari atau \$6 milyar per tahun.⁴⁴

Setelah kunjungan Khaddam, Tehran melancarkan serangkaian serangan antara bulan Maret dan Mei 1982, yang menyebabkan pengusiran tentara Irak dari sebagian besar wilayah yang telah didudukinya di Iran. Selama periode ini Suriah mengerahkan bala tentaranya di sepanjang perbatasan dengan Irak, sementara pesawat-pesawat tempur secara berkala sengaja terbang melanggar perbatasan udara Irak. Langkah ini berhasil membuat Irak mengurungkan niatnya untuk melawan serangan dari Iran⁴⁵.

2. Zenith (titik tertinggi) hubungan Iran dan Suriah (1982 – 1985).

Periode kedua dalam evolusi aliansi ini ditandai dengan kerjasama yang dekat dan upaya intensif untuk menanggapi tantangan baru tidak hanya di kawasan Teluk , tetapi yang lebih penting di Levant (wilayah berbatasan dengan laut mediterania dari Mesir hingga Turki). Kedua sekutu terus berkolaborasi menghadapi Saddam Hussein setelah pengusiran tentara Irak dari tanah Iran. Tonggak utama dalam hal ini adalah keputusan

⁴⁴Shahram Chubin and Charles Tripp, *Iran and Iraq at War*. Westview Press, Boulder, Colorado, 1988, hal 180 dan Hirschfeld, hal 107-108.

⁴⁵ ibid

Iran untuk melanjutkan perang Teluk dengan menginvasi Irak pada Juli 1982 dalam upaya untuk menggulingkan rezim Baath di Irak.

Keberhasilan kolaborasi Iran – Suriah selama periode ini adalah disaat aliansi ini berhasil menaklukan atau memukul mundur musuh-musuh mereka dari daerahnya atau wilayah sekutu mereka. Seperti yang terjadi pada musim panas 1982, Israel melakukan invasi ke Lebanon tetapi pada tahun 1985 berhasil dipukul mundur dan memaksa mereka menarik mundur pasukan bertahan mereka. Suriah bekerjasama tidak hanya dengan Iran tetapi juga dengan Uni Soviet. Kerjasama ini membuat Suriah – Iran menjadi kekuatan utama apalagi setelah mereka berhasil mengusir Amerika dan Perancis dari Beirut. Tetapi aliansi ini bukan tanpa cacat, pada saat bersamaan mereka berhasil memukul mundur Israel-Amerika-Perancis dari Lebanon, Iran menolak perdamaian dengan Irak dan memutuskan melanjutkan peperangan dengan berusaha menggempur Irak. Hal ini mungkin didasari atas keinginan balas dendam dan percaya diri yang berlebihan dari Iran, yang telah meraih kemenangan di Lebanon dan ingin mengulang hal yang sama di Irak. Tetapi kenyataan mereka kewalahan dan merugi sangat besar hingga melemahkan kekuatan mereka. Irak di bantu oleh Amerika, Perancis, Arab dan juga trio Irak-Yordania-Mesir yang merupakan sahabat lama. Gabungan kekuatan ini berhasil mengusir Iran dari Irak dan mengakibatkan sanksi dari dunia Internasional untuk Iran. Seiring melemahnya kekuatan Iran, Suriah pun seakan ikut tenggelam didalamnya dan hubungan aliansi ini telah mencapai pada titik puncak hingga akhirnya melemah.

3. Ketegangan dan konsolidasi aliansi (1985-1988)

Periode ketiga dalam evolusi aliansi ini merupakan periode paling bermasalah dalam hubungan bilateral keduanya, tetapi pada saat yang bersamaan periode ini cukup penting bagi aliansi guna meletakkan dasar-dasar kemitraan yang dapat bertahan, dengan kata lain institusionalisasi poros jangka panjang. Di daerah Levant dan Teluk Persia, di mana dua sekutu ini sebelumnya bekerja sama dan berkolaborasi, tetapi mereka sekarang memiliki agenda yang saling bertentangan. Kegagalan Suriah untuk mengakhiri perang sipil di Lebanon (paska penarikan pasukan Amerika dan Pasukan Israel) lalu Iran dengan perang Teluk yang berkepanjangan mengakibatkan melemahnya posisi Teheran – Damaskus di kawasan, hal ini membuat mereka beralih ke Lebanon (kacau paska perang) dan seolah berebut untuk menanamkan pengaruhnya. Kedua sekutu ini mengadopsi posisi yang berbeda terhadap Lebanon, bahkan hampir setiap masalah yang berkaitan dengan Lebanon, keduanya berdiri bersebrangan. Kedua sekutu itu berbeda visi pada masa depan politik Lebanon. Suriah ingin mereformasi sistem politik dan membangun pemerintahan yang stabil, dengan negara sekuler sebagai sistem dan berada dalam lingkup pengaruhnya, sementara Iran menginginkan untuk terciptanya sistem teokratis yang berpedaman pada model negaranya.

Dengan meningkatnya kaum fundamentalis yang pro Iran dengan gerakan Hizbullah dan dari sisi sekuler yang pro Suriah dengan milisi Amal, menimbulkan ketegangan serta bentrokan yang terus terjadi setiap hari, membuat hubungan Damaskus – Teheran berubah menjadi tidak harmonis mengarah konfrontasi.

Hal lain yang memicu penurunan hubungan aliansi ini adalah sikap dari kedua pihak yang memilih jalan atau sikap berbeda ketika menghadapi isu-isu regional, seperti ketika Milisi Amal melakukan pengepungan perkampungan pengungsi Palestina tahun 1985 dan 1987, Suriah langsung mengambil tindakan mendukung aksi dari Milisi Amal tersebut sedangkan Iran hanya bersimpati dan mengusulkan jalan diplomasi damai tanpa mengirimkan bala bantuan apa pun. Bersamaan dengan itu, di Teluk, tekad Iran untuk mencari keadilan dengan melakukan balasan perang melawan Irak membuat posisi Iran semakin terisolasi, dikarenakan banyak pihak yang tidak setuju dengan ini dan mereka balik membantu Irak melawan Iran dan membuat kemenangan Iran semakin sulit dan memudar, sementara Assad bersikap dingin dan cenderung setuju dengan proses negosiasi penghentian perang. Masih banyak lagi isu-isu antar kedua belah pihak yang membuat aliansi berada diujung tanduk, tetapi melalui konsultasi dan konsolidasi intensif secara terus menerus, akhirnya Iran – Suriah mampu memprioritaskan kepentingan mereka, meyelesaikan perbedaan dan mengidentifikasi parameter kerjasama antara tahun 1985 – 1988. Kebangkitan kekuasaan Irak akhir 1980-an yang membalikan posisi Iran dalam perang Teluk, penarikan dukungan Soviet atas Suriah pada masa Gorbachev dan meningkatnya pengaruh Amerika di Timur Tengah telah membantu proses konsolidasi antara Iran – Suriah kembali lancar karena situasi diatas justru meningkatkan kebutuhan keduanya untuk saling bekerjasama dan menghilangkan perbedaan, mengedepankan persamaan, persamaan atas kepentingan menstabilkan keadaan di Lebanon dan ancaman atas musuh yang sama.

4. Kendali Irak di Leviant dan Teluk (1988-1991)

Pada periode ini Iran dan Suriah berusaha dengan sekuat tenaga membentuk kerjasama bilateral untuk tetap berkancah di kawasan meskipun keadaan kedua Negara dalam masa yang sulit akibat perang Teluk dan perang sipil di Lebanon yang berkelanjutan. Setelah berhasil memukul mundur Iran dari wilayahnya dan memenangkan peperangan, Saddam Husein melakukan agresi lanjutan dengan berusaha menginvasi Kuwait (Agustus 1990), tidak dapat dipungkiri pada waktu itu Irak adalah kekuatan besar, salah satu dari lima negara dengan kekuatan militer yang terbesar di dunia, ditambah dengan terbentuknya ACC (Arab Cooperation Council) yang terdiri dari Irak, Yordania, Mesir dan Yaman Utara (Februari 1989) semakin membuat Iran – Suriah terisolasi.⁴⁶

Tantangan utama aliansi ini kembali 55egara dari Lebanon, dimana pemberontak anti Suriah yang dipimpin oleh komandan tentara perang mereka, Michel Aoun melakukan pemberontakan dengan bantuan persenjataan dari Irak. Meskipun dalam kondisi terpuruk aliansi berhasil memukul balik Aoun, Suriah bekerjasama dengan Iran yang memobilisasi Hizbullah dan kelompok-kelompok Lebanon lain mengalahkan pemberontak Michel Aoun pada tahun 1989. Selama krisis perang Kuwait 1990-1991, Iran yang sedang dalam kondisi lemah setelah perang 8 tahun dengan Irak sebelumnya, memilih untuk tidak terlibat dan tetap dalam posisi netral. Sementara itu Suriah bergabung dengan koalisi pimpinan AS untuk menghalau Saddam Hussein dan ini negara

⁴⁶Curtis R. Ryan, "Jordan and the Rise and Fall of the Arab Cooperation Council", Middle East Journal, 52, No. 3 (1998), hal. 386-401.

keuntungan bagi Suriah karena berada di sisi pemenang, dibuktikan dengan janji George W Bush untuk menyelesaikan konflik Arab – Israel.

Sempat beredar kabar bahwa hubungan antar Suriah dan Iran merenggang dengan mencairnya hubungan Iran dan Irak, tetapi hal ini tidak terjadi, dibuktikan dengan kunjungan Hafez Assad ke Teheran dan mendapat jaminan dari para Ulama Iran bahwa mereka akan tetap netral dan mematuhi sanksi PBB pada Irak. Kedua belah pihak juga mengambil langkah lebih lanjut untuk mengkonsolidasikan dan melembagakan aliansi mereka dengan mendirikan Joint Higher Syrian – Iran Cooperation Committee, dipimpin oleh masing-masing wakil presiden dan menteri luar negeri. Tujuan dari konsolidasi ini adalah untuk menempa hubungan politik, ekonomi dan militer yang lebih erat antara kedua belah pihak melalui konsultasi berkala.

5. Paska Perang Dingin (1991-2003).

Menyusul kekalahan Irak di konflik Teluk dan akhir dari Perang Dingin tahun 1991, Suriah dan Iran berusaha bangkit dari keterpurukan akibat perang melawan Irak dan pergolakan di Lebanon. Di masa ini mereka berhadapan dengan masalah-masalah yang cukup pelik, diantaranya adalah runtuhnya Uni Soviet, hasil dari Perang Dingin, yang merupakan sekutu mereka (terutama Iran). Lalu ada Israel yang menduduki dataran tinggi Golan dan juga Irak yang masih dipimpin oleh Saddam Husein dengan agresivitasnya. Tetapi semua hal ini tidaklah membuat kedua Negara ketakutan dan berusaha mencari perlindungan dari Negara lain, melainkan mereka berusaha untuk lebih meningkatkan kerjasama dalam area yang lebih luas untuk mempertahankan wilayah serta existensi. Hal ini diwujudkan dengan kerjasama bidang militer antar keduanya

untuk mendapatkan pengetahuan, memproduksi hingga mengelola rudal balistik di dalam negeri, sekita awal tahun 1991. Pada tahun yang sama kedua sekutu ini juga saling membantu guna mewujudkan kepentingan Negara masing-masing, seperti Damaskus membutuhkan Iran dalam konflik dan pembicaraan perdamaian antara Arab-Israel. Teheran pun merasa kepentingan mereka terhadap Lebanon tidak akan berhasil tanpa bantuan dari Suriah. Selain itu dukungan kedua negara terhadap gerakan-gerakan Islam seperti Hamas dan Hizbullah juga semakin meningkat, mengingat bahwa gerakan-gerakan Islam ini adalah perpanjangan tangan dari perwujudan kepentingan keduanya di lapangan.

6. Paska runtuhnya pemerintahan Saddam Husein di Irak (2003-2011).

Setelah invasi oleh sekutu pimpinan AS yang berujung pada pendudukan atas Irak, kerjasama antara kedua Negara meningkat secara signifikan. Suriah dan Iran memandang runtuhnya Saddam Hussein oleh pasukan AS dan sekutunya pada bulan April 2003 dengan sikap ambivalen. Di satu sisi, keduanya menyambut gembira hilangnya musuh lama mereka. Di sisi lain, kemenangan militer AS memunculkan kekhawatiran bahwa mereka akan menjadi target berikutnya. Tetapi kekhawatiran itu masih bisa menunggu, karena AS masih harus berbenah setelah perang yang melelahkan dengan Iraq, memulihkan kembali perekonomian dalam negeri yang tersisihkan oleh perang Iraq hingga menanamkan kuku mereka membangun Negara Iraq kembali sesuai dengan keinginan mereka. Selama proses penantian ini, dimanfaatkan oleh Suriah dengan segera bereaksi cepat langsung melakukan hubungan dengan partai dan teman mereka di Iraq, dengan misi membuat pemerintahan Iraq yang baru untuk mendukung Suriah juga Iran

dan melakukan penguatan kekuatan kelompok Syiah di Iraq agar mereka dapat berpartisipasi di pemerintahan.

7. Konflik Suriah dan Keterlibatan Iran (2011 – sekarang)

Imbas dari fenomena Arab Spring akhirnya sampai juga di negara Suriah, gelombang protes untuk menggulingkan kepemimpinan yang otoriter menjadi landasan terjadinya perang saudara seperti saat ini.

Iran sebagai sahabat dekat Suriah khususnya dinasti Bashar Al Assad memang berada dalam posisi dilematis. Apabila Iran mendukung Suriah, maka integritas mereka sebagai sebuah negara yang selama ini berjuang demi menggulingkan pemerintahan yang otoriter dan memperjuangkan pemerintahan republik Islam akan tercoreng dan mengalami kemunduran. Kemudian Iran akan dipandang sebagai negara yang hipokrat dan oportunistis oleh negara-negara Arab. Apabila Iran tidak mendukung pemerintahan Bashar Al Assad, tidak ada jaminan bahwa penggantinya akan mendukung dan berpihak kepada Iran terutama dalam menjalankan kepentingan-kepentingannya di kawasan.

Dua pilihan yang sangat tidak populis ini membuat Iran dalam posisi yang sulit dan Iran harus memilih salah satunya, akhirnya Iran memutuskan untuk mendukung pemerintahan Bashar al Assad di Suriah dan akan melakukan segalanya guna mempertahankan pemerintahan tersebut tetap berdiri. Iran berusaha membantu Suriah dalam menangani para demonstran dengan memberikan saran dan alat-alat keamanan terhadap petugas keamanan Suriah dengan harapan bahwa protes yang terjadi segera berakhir, tetapi kenyataan berkata lain, gelombang protes semakin besar dan melebar akibat sikap represif dari pemerintah Suriah dalam menangani para demonstran.

Ketika konflik Suriah sudah mencapai ranah Internasional, melibatkan intervensi dari PBB, Amerika Serikat, Arab Saudi dan juga Turki, Iran tetap pada posisi mereka mendukung Suriah, dibantu oleh Russia dan China. Dan Pemerintah Bashar al Assad menyatakan tidak akan mundur karena sesungguhnya para pemberontak itu adalah para teroris yang akan membawa Suriah pada kehancuran.

C. Sikap Iran Terhadap Konflik Suriah

Sejak awal gelombang protes terhadap rezim Bashar Assad di Suriah, Iran telah mendukung Bashar Al Assad baik dalam dukungan moral atau keamanan. Iran menuduh bahwa Suriah adalah korban dari upaya oleh Barat, dipimpin oleh Amerika Serikat, untuk menggulingkan rezim Assad, dengan alih-alih "Arab Spring". Seiring dengan bantuan militer, teknis dan bantuan intelijen, Iran juga telah membantu Suriah pada tingkatan politik, pejabat Iran paling senior, termasuk pemimpin tertinggi dan presiden, telah mendukung legitimasi dan penanganan krisis yang dilakukan oleh presiden Suriah.

Iran juga mengecam keras keterlibatan Negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat beserta sekutunya, dalam urusan dalam negeri Suriah. Iran berulang kali menekankan bahwa konflik di Suriah, yang itu dipicu oleh Barat, pada dasarnya berbeda dari kebangkitan Islam dan bukanlah fenomena Arab Spring.

Pernyataan dukungan juga disampaikan oleh para petinggi Iran, seperti:

- Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khomeini:

"The events in Syria are fundamentally different in nature from those occurring in the other countries of the Middle East. By trying to simulate in Syria the events that occurred in Egypt, Tunisia, Yemen, and Libya, the Americans are trying to create problems for Syria, a country that is on the path of resistance....The Islamic awakening in the regional countries is anti-Zionist and anti-American in

nature....America and Israel are clearly involved in the events in Syria....The movement of the people of Bahrain is similar to the movement of the people of Egypt, Tunisia, and Yemen, and there is no sense in distinguishing between these similar movements".⁴⁷

- Ulama Iran:

Dalam sebuah berita, seorang ulama Iran ternama, Ayatollah Makarem Shirazi menyatakan bahwa krisis di Suriah bukan konflik sektarian antara Sunni dan Syiah tapi sebuah plot politik yang ditetaskan Barat dan rezim Israel.

"Bentrokan Suriah bukan perselisihan agama antara Syiah dan Sunni melainkan konflik bermotivasi politik antara aliran sesat yang didukung Barat dan Israel di satu sisi, dan Muslim baik Sunni dan Syiah di sisi lain," Ayatullah Nasser Makarem Syirazi menyampaikan hal itu dalam sebuah surat untuk Grand Sheikh Al-Azhar Mesir, Ahmed Al-Tayeb.⁴⁸

Ulama Iran itu menyatakan, Takfiri (kelompok yang menjatuhkan orang/pihak lain) berusaha memecah belah umat Islam dan menambahkan bahwa musuh berusaha melukiskan Islam sebagai agama yang penuh kekerasan dan teror. Ayatollah Makarem Shirazi juga mengutuk kejahatan kelompok-kelompok ekstremis di Suriah sambil menekankan perlunya solusi damai dalam krisis Suriah. Menurutnya, solusi terbaik krisis Suriah harus logis, tanpa kekerasan dan mampu melindungi umat Islam. Ayatollah Makarem Shirazi juga mengutuk serangan terbaru yang terjadi di sebuah masjid Damaskus dan menewaskan seorang ulama terkemuka Sunni serta pembunuhan terbaru ulama Syiah di dekat Kairo. AS, negara-negara Eropa dan rezim Israel berada di balik

⁴⁷ Dalam, <http://www.leader.ir/langs/FA/index.php?p=contentShow&id=8267.#sthash.rfBm7OaH.dpuf>, diakses pada 19 Februari 2012.

⁴⁸ Dalam, <http://www.islamtimes.org/vdcdj50xxyt05k6.lp2y.html>, diakses pada 19 Februari 2012.

kejahatan itu, katanya sambil menambahkan bahwa kekejaman merupakan bagian dari plot untuk memenuhi kepentingan rezim Zionis dan sekutunya.

Sedangkan para ulama syiah di Iran, pendapat mengenai konflik di Suriah pecah dalam menyikapinya. Ulama senior Syiah Ayatullah di Qom, Iran, telah mengeluarkan fatwa mendesak pengikutnya untuk bergabung dengan pertempuran di Suriah, sementara banyak ulama Syiah Irak yang berbasis di Najaf tetap menentang keterlibatan warga Syiah dalam pertempuran. Komandan milisi Syiah yang bertanggung jawab untuk merekrut milisi di Irak seperti dilansir asharq alawshat, mengatakan jumlah relawan telah meningkat pesat sejak diterbitkannya fatwa tersebut, meskipun terjadi perpecahan di kalangan ulama.

Sementara pemerintah Iran dan beberapa ayatullah berbasis Qom antusias mendukung Assad, otoritas Syiah di Najaf, yang dipimpin oleh Ayatollah Ali Al-Sistani, menolak warga Syiah menjadi relawan ke Suriah terlibat dalam perang yang mereka lihat sebagai persoalan politik, bukan persoalan sektarian. Meskipun posisi Sistani menolak, bagaimanapun, beberapa pihak Syiah dan milisi di Irak, yang setia kepada pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah mengirim anggotanya untuk berperang di Suriah.

Seorang ulama senior Syiah, yang menjalankan salah satu dari empat kantor otoritas keagamaan berwenang di Najaf, mengatakan bahwa mereka yang pergi berperang di Suriah yang melawan kehendak otoritas ulama. Menurut seorang ulama yang dekat dengan penguasa Najaf, "perselisihan antara Qom dan Najaf tidak baru, tapi perselisihan ini mempengaruhi sikap Irak pada masalah Suriah." Dia menambahkan bahwa "Kedua otoritas ulama telah bersatu, kita akan melihat pemerintah Irak mendukung rezim

Suriyah.” Pemerintah Irak mengumumkan kenetralannya pada konflik, tetapi dasarnya milisi Syiah Irak ke Suriyah telah membahayakan posisi tersebut.

Ulama senior dan politisi Syiah mengatakan bahwa terhadap Suriyah, bagi Khamenei dan para pendukungnya di Irak dan Iran, merupakan bagian penting dari dominasi “Bulan sabit Syiah” yang berlangsung dari Teheran ke Beirut, melalui Baghdad dan Damaskus.

Dalam menanggapi pertanyaan tentang legitimasi pertempuran di Suriyah, Ayatullah Al-Kazim Ha’eri, yang tinggal di Teheran, mengklaim pertempuran ini adalah kewajiban untuk membela Islam. Menurut sumber milisi, sekitar 50 Syiah Irak pergi ke Suriyah setiap minggu untuk berperang bersama pasukan Assad dan membela kuil Syiah, seperti Kuil Zainab di pinggiran Damaskus.

Ali, mantan anggota Tentara Al-Mahdi termasuk yang dipimpin Moqtada Al-Sadr, mengatakan ia telah mengemas tas untuk pergi ke Suriyah: “Saya mengikuti perintah otoritas saya. Pemimpin spiritual saya mengatakan pertempuran di Suriyah adalah kewajiban agama, dan aku tidak peduli apa yang orang lain katakan dan tidak ada yang memiliki hak untuk menghentikan saya. Aku berjuang untuk membela agama saya dan putri imam saya, “ungkapnya merujuk kepada Kuil Zainab.

Para ulama di Najaf, yang disebutkan di atas, mengatakan Iran menggunakan perlindungan kuil Syiah sebagai alasan untuk mendorong warga Syiah untuk berperang. Sejak jatuhnya rezim Saddam, pengaruh Iran di Irak telah meningkat dan mencoba untuk mendapatkan pijakan di Najaf pada khususnya. Ulama senior Syiah Iran telah membuka kantor di Najaf serta organisasi non-pemerintah, badan amal dan pusat kebudayaan,

semua didanai oleh otoritas Syiah Iran atau kedutaan Iran di Baghdad, menurut pejabat setempat.

Seorang ulama yang bekerja di bawah Khamenei, di bawah kondisi anonimitas, mengatakan: “Kami memiliki proyek besar yang menargetkan penyebaran prinsip velayat-e faqih (ahli hukum perwalian), dan remaja adalah target kami. Kami tidak bertujuan untuk mendirikan negara Islam di Irak, tapi kami ingin setidaknya membentuk badan revolusioner yang akan siap bertarung dalam membela proyek Syiah”. Haydar Al-Gharabi, seorang guru di Hauza (sekolah agama) Najaf yang dekat dengan otoritas keagamaan Syiah di kota, mengatakan kepada Asharq Al Awsat: “Perbedaan pendapat antara Najaf dan Qom itu suatu hal yang alami, dan itu bukan hanya perselisihan antara dua pihak berwenang di Irak dan Iran saat media suka menggambarkan hal itu, tampak seperti perselisihan yang sebenarnya antara dua pihak yang berlawanan. Ini adalah ketidaksepakatan yang ada di dalam Najaf, dan di dalam otoritas Qom.” Gharabi menambahkan bahwa ada beberapa ulama di Qom yang setuju dengan rekan-rekan mereka di Najaf, dan beberapa di Najaf yang setuju dengan rekan-rekan mereka di Qom.⁴⁹

- Mullah senior Iran, Taeb:

“Syria is the 35th province and a strategic province for us. If the enemy attacks us and seeks to take over Syria or (Iran’s) Khuzestan, the priority lies in maintaining Syria because if we maintain Syria, we can take back Khuzestan. However, if we lose Syria, we won’t be able to hold Tehran. We are now involved in Syria and our front line is there. In this front we are standing against all arrogant forces... Syria had an army but this army was not able to manage the war inside Syrian cities. Therefore, Iran suggested establishing urban Bassij units to run the urban

⁴⁹Dalam, <http://www.kiblat.net/2013/07/22/ulama-syiah-pecah-menyikapi-suriyah/>, diakses pada 19 Februari 2012.

warfare... Syria's Bassij was established with 60,000 Hezbollah members and they took over the war in the streets from the army."⁵⁰

Mehdi Taeb, kepala 'Basis Ammar' pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dan orang dalam Korps Garda Revolusi (IRGC) bersama direktur biro intelejen Hossein Taeb menyampaikan pidato pada sebuah konferensi Basij di Mashhad, Iran yang menjabarkan pentingnya posisi Suriah terhadap rezim Iran. Dalam pidatonya, ia mendefinisikan Suriah sebagai provinsi Iran yang sangat strategis, dan mengatakan bahwa mempertahankan keberadaan rezim Suriah bahkan lebih penting bagi rezim Iran daripada menjaga provinsi kaya minyak Iran selatan Khuzestan – meskipun Khuzestan strategis secara ekonomi.

Taeb juga menekankan bahwa jika musuh-musuh Iran secara bersamaan menyerang Suriah dan Khuzestan, Teheran akan lebih memilih untuk mempertahankan Suriah, karena kerugian jika rezim Suriah tumbang akan mengakibatkan hilangnya Teheran itu sendiri. Dia menambahkan bahwa Iran telah membantu untuk menempatkan 60.000 tentara garda revolusi di Suriah untuk memerangi pemberontak bersama rezim Presiden Suriah Bashar Al Assad.

Pandangan Taeb yang penting dan strategis terkait hubungan antara rezim Suriah dan Iran itu sebelumnya telah diungkapkan oleh Ali Akbar Velayati, penasehat pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei, pada tanggal 8 Februari 2013: "Iran telah merencanakan posisi defensif di luar perbatasannya sendiri, dan itu terkait dengan nasib dari negara-negara Islam, inilah mengapa Iran akan terus mendukung orang-orang seperti Bashar Al-Assad sampai akhir ... "

⁵⁰ Dalam, <http://www.ncr-iran.org/en/ncr-statements/terrorism-fundamentalism/12871-khamenei-s-crony-if-syria-the-35th-province-of-iran-falls-tehran-falls>, diakses pada 19 Februari 2012.

Pernyataan Taeb yang memicu kecaman keras dari kalangan konservatif dan reformis dimana mereka mengklaim bahwa pernyataan Taeb merugikan kedaulatan Iran dengan kesediaannya untuk melepaskan bagian berharga dari Iran dan bahwa pernyataannya mendukung klaim Arab bahwa Khuzestan bukan bagian dari Iran. Mereka juga mengatakan bahwa pernyataannya mendukung klaim musuh-musuh Iran bahwa rezim Iran menindas warga negaranya sendiri melalui garda revolusi, dan bahwa pernyataan juga mengkonfirmasi klaim bahwa Iran kini mendukung penindasan warga sipil di Suriah.

Dalam menanggapi kritik, Taeb mengatakan dalam wawancara terpisah dengan tiga media Iran bahwa pernyataannya telah didistorsi, "Media-media asing dan anti-Iran tidak berdaya untuk berurusan dengan media milik rezim Iran, dan karena itu mereka mendistorsi pernyataan yang dibuat oleh Iran... posisi Iran mengenai perkembangan di Suriah benar-benar jelas, dan pernyataan saya adalah analisis politik dan strategis."⁵¹

- Presiden Iran, Hassan Rouhani:

*"In all these countries, the revolt is against authoritarianism and foreign colonialism, but in Syria, the issue is sectarian ... This is why we are opposed to certain activities in Syria. We see that the neighboring countries are intervening, and such interventions are not desirable from our point of view."*⁵²

Presiden baru Iran, Hasan Rouhani melihat perang yang terjadi di Suriah adalah perang antar sekte, yang dapat menyelesaikan permasalahan ini adalah warga Suriah sendiri. Intervensi terhadap masalah ini berarti tidak menghargai dan menghormati

⁵¹Dalam, <http://www.an-najah.net/fokus/ulama-syiah-ini-menjelaskan-pentingnya-syiah-bagi-hegemoni-rezim-iran/>, diakses pada 30 April 2012

⁵²Dalam, <http://docs.house.gov/meetings/FA/FA13/20130731/101227/HHRG-113-FA13-Wstate-DubowitzM-20130731.pdf>, diakses pada 30 April 2012

kedaulatan Negara Suriah dan tidak mendukung hasil dari proses pemilihan umum yang mana Bashar al Assad terpilih secara sah menjadi presiden Suriah.